

**PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
di Kabupaten Padang Pariaman)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Strata Satu pada Fakultas Ekonomi*



Oleh:

RAHMAD HIDAYAT
2009/13011

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (*Studi Empiris Pada SKPD di Kabupaten Padang Pariaman*)”

Nama : Rahmad Hidayat

NIM/BP : 13011 /2009

Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, 19 Januari 2015

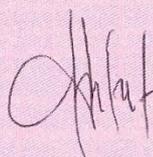
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



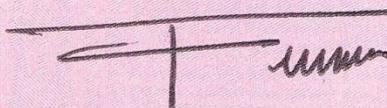
Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
NIP. 19580519 199001 1 001

Pembimbing II



Mayar Afriyenti, SE, M.Sc
NIP. 19840113 200912 02 005

Ketua Prodi



Fefri Indra Arza, SE, M.Si, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada SKPD di Kabupaten Padang Pariaman)**

Nama : Rahmad Hidayat
NIM/BP : 13011 / 2009
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, 19 Januari 2015

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak	
2. Sekretaris	: Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	
3. Anggota	: Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	
4. Anggota	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	

ABSTRAK

Rahmad Hidayat (13011/2009) : Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Skripsi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2014.

**Pembimbing : 1. Dr. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
2. Mayar Afriyenti, SE, M.Sc**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Padang Pariaman.

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD Kabupaten Padang Pariaman. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus slovin kesalahan yang ditoleransi sebesar 5 %, dan diperoleh 32 sampel SKPD. Jenis data yang digunakan adalah data subyek, dan sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $7,869 > 2,0017$ ($sig\ 0,000 < \alpha\ 0,05$) yang berarti H_1 ditolak. 2) sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah, dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,147 > 2,0017$ ($sig\ 0,000 < 0,05$) yang berarti H_2 diterima.

Dalam penelitian ini disarankan: (1) instansi agar selalu taat pada peraturan atau prosedur dalam melakukan kegiatan, serta mengusahakan ketepatan waktu dalam menghasilkan barang atau jasa (2) instansi agar lebih sering melakukan evaluasi kinerja yang terkait dengan pengelolaan keuangan, (3) dalam melakukan penjurnalan dan postingan sebaiknya dilakukan sesuai dengan nomor yang telah ditetapkan pemerintah, dan (4) menambahkan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Padang Pariaman”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing I dan juga kepada Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc selaku pembimbing II, yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan masukan yang berharga dalam menyelesaikan skripsi ini. dan penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak atas kritik dan saran yang telah Ibu berikan dalam penulisan skripsi ini. Selain itu penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah mencurahkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.
4. Staf kepastakaan dan staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah ikut membantu memberikan pelayanan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua beserta kakak-kakak tercinta dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman mahasiswa Program Studi Akuntansi angkatan 2009 yang sama-sama berjuang, membantu, memberikan motivasi saran dan informasi yang berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hanya doa yang dapat penulis ucapkan semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	
1. Kinerja Pemerintah Daerah	9
a. Pengertian Kinerja	9
b. Arti Penting Kinerja Pemerintah Daerah	10
c. Tingkatan Kinerja pemerintah Daerah	12
d. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah	13
e. Penilaian Kinerja	15
f. Manfaat Kinerja Pemerintah Daerah	17
2. Pengelolaan Keuangan Daerah	18
a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah	18

b. Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah	20
c. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah	22
d. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah	22
e. Sumber-sumber Keuangan Daerah	23
3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	24
a. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	24
b. Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	25
c. Kedudukan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	26
d. Lingkungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	27
e. Kebijakan Pengembangan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	29
B. Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Konseptual	31
D. Hipotesis	33

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	34
B. Populasi dan Sampel	34
C. Jenis dan Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Variabel Penelitian	38
F. Instrumen Penelitian dan Pengukuran Variabel	38
G. Model dan Teknik Analisa Data	39
a) Uji Kualitas Data	39
1. Uji Validitas	40
2. Uji Reliabilitas	41

b) Uji Asumsi Klasik	42
1. Uji Normalitas	42
2. Uji Multikolinearitas	43
c) Teknik Analisis Data	43
I. Analisis Deskriptif	43
II. Metode Analisa Data	44
a. Uji Regresi Berganda	44
b. Uji Koefisien Determinasi	44
III. Uji Hipotesis	45
a. Uji F	45
b. Uji t	45
H. Definisi Operasional	46
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sampel dan Responden Penelitian	48
B. Analisis Deskriptif	49
C. Uji Validas dan Reliabilitas	58
D. Uji Asumsi Klasik	60
E. Pengujian Model	61
F. Uji Hipotesis	64
G. Pembahasan	65
 BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	68
C. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama SKPD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	36
2. Daftar Skor Jawaban Pernyataan Berdasarkan Sifat	40
3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	40
4. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i>	42
5. Nilai <i>Cronbach Alpha</i> Instumen	43
6. Tingkat Pengembalian Kuesioner	49
7. Jumlah Responden Berdasarkan Jabatan	50
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	51
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	51
10. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja	52
11. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Kinerja Pemerintah Daerah	53
12. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah	55
13. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Sistem Akuntansi Keuangan	56
14. Statistik Deskriptif	59
15. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Terkecil	60
16. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Instrumen Penelitian	60
17. Uji Normalitas	61
18. Uji Multikolinearitas	62
19. Uji F Hitung.....	63

20. Uji <i>Adjusted R Square</i>	64
21. Uji Koefisien Regresi Berganda.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	73
2. Tabulasi Data Penelitian	79
3. Hasil Analisis Validitas dan Reliabilitas	83
4. Statistik Deskriptif	86
5. Uji Asumsi Klasik	86
6. Uji Model dan Asumsi Klasik	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah daerah sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki, agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik (Abdul: 2007).

Kinerja telah menjadi salah satu kata kunci yang banyak dibicarakan diberbagai organisasi mulai dari organisasi perusahaan, pemerintahan, dan juga perguruan tinggi. Demikian juga kinerja masuk dalam setiap aspek sosial ekonomi kemasyarakatan. Kondisi ini terlihat dari banyak organisasi yang memasukkan kata kinerja dalam visi dan misinya. Pencapaian kinerja tidak hanya diharapkan pada karyawan saja melainkan dalam jangka panjang diharapkan mampu meningkatkan kinerja kelembagaan (Rosmawati: 2011)

Kinerja menjadi gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi tentang efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menghasilkan *output* yang berkualitas, membandingkan hasil

kerja dengan rencana kerja, serta menunjuk efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diukur semata-mata dari pespektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dikarena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya (Irvan: 2013).

Dalam meningkatkan kinerja organisasi tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Banyak faktor yang turut menentukan suatu organisasi sukses dalam meningkatkan kinerja, baik yang telah dibuktikan secara empiris oleh peneliti-peneliti terdahulu, maupun faktor-faktor yang belum dimasukkan dalam penelitian. Abdul (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa, kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja yang terdapat keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan maka dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik mempunyai pengaruh terhadap kinerja suatu instansi atau organisasi. Pengelolaan Keuangan yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula, hal ini dapat mengindikasikan kinerja yang baik pula pada suatu instansi atau organisasi.

Hal ini ditegaskan oleh Amelia (2013), bahwa pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu penyelenggaran pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

maupun kegagalan pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja.

Pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Askam Tuasikal, 2008). Uraian tersebut menunjukkan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar semua hak dan kewajiban daerah dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah. Hal ini ditegaskan pula dalam PP 58 Tahun 2006 dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. (Askam: 2008).

Pengelolaan keuangan daerah harus transparansi yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Kemudian, *value for money* yang berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip tersebut, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Sehingga nantinya akan melahirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Faktor lain yang turut menentukan suatu organisasi sukses dalam meningkatkan kinerja adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Menurut Mardiasmo dalam Almada (2013) menerangkan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah akan tercapai dengan dilaksanakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, artinya sistem akuntansi keuangan daerah dapat menimbulkan dukungan yang kuat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yang dicapai.

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah (Wawan dan Lia: 2009). Yang disebut keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Wawan dan Lia: 2009).

Sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai tidak hanya dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi,

dan keabsahan pembelajaran dana, tetapi sistem akuntansi keuangan daerah tersebut juga dapat mendukung pada pencapaian kinerja, penilaian pemerintahan yang baik dapat dilihat dari pencapaian kinerja pemerintahan itu sendiri, pengukuran dalam pencapaian kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. (Wawan dan Lia: 2009).

Selain itu ketika pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya, Satya Lencana Karya Satya adalah sebuah tanda penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah berbakti selama 10 atau 20 atau 30 tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kinerja yang baik, kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan, dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya. Dalam kegiatan ini ditargetkan 300 orang, tapi hanya 119 PNS yang menerima penghargaan sehingga realisasi hanya 39,67%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hanya sedikit pegawai yang benar-benar disiplin dan mengabdikan pada pekerjaannya, yang secara langsung menyebabkan rendahnya kinerja pemerintah daerah (LAKIP Kabupaten Padang Pariaman 2013).

Kemudian dalam penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur), dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan yang diikuti oleh semua Kasubag Perencanaan pada semua SKPD se Kabupaten Padang Pariaman. Target yang ingin dicapai untuk kegiatan ini adalah 10 SKPD dapat menyusun SOP Pelayanan, namun realisasinya hanya 1 SKPD yang sudah memiliki SOP Pelayanan atau terealisasi 0,1%. Padahal SOP sangatlah penting bagi peningkatan kinerja SKPD, karena SOP merupakan sebuah

pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. (LAKIP Kabupaten Padang Pariaman 2013).

Kemudian dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah belum menjalankan fungsi dan peran secara efektif. Pemerintah daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif. Dari Rapat Koordinasi Nasional BNPB-BPBD Tahun 2014 diketahui bahwa terdapat temuan dari BPK yang belum ditindaklanjuti, diantaranya penggunaan dana bantuan tidak tepat sasaran, penyusunan data nominatif penerima bantuan dilakukan tidak cermat, pemanfaatan uang lauk pauk tidak sesuai dengan tujuan pemberian bantuan serta belum didukung dengan bukti, dan sisa dana bantuan belum disetor ke kas negara.

Selain itu kinerja SKPD yang ada tidak mampu untuk menggali potensi daerah yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Daerah Padang Pariaman mempunyai segudang potensi selain kemegahan eksotis alam pesisir pantainya. Sangat disayangkan, daerah yang memiliki kekayaan yang nyata ini hanya bisa menghasilkan PAD sebanyak 2,5%.

Dari fenomena yang terjadi dapat dilihat bahwa belum terlaksananya dan terakomodirnya kinerja pemerintah daerah dikarenakan masih ada kendala dalam pelaksanaan rencana kerja sehingga kinerja pemerintah daerah belum mencapai target dan tujuan yang telah direncanakan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat apakah pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah dapat menunjang kinerja

pemerintah daerah, karena kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah dapat dipertanggungjawabkan dihadapan publik.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”**.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang diuraikan diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seauhmana pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman?
2. Seauhmana sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Seberapa jauh pengaruh pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

2. Seberapa jauh pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian atas pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah, dan kinerja pemerintah daerah dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan, dan disamping itu, penelitian tersebut dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan ilmu penulis khususnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Bagi Instansi Pemerintah daerah, dapat menjadi masukan tentang pentingnya pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja daerah.
3. Bagi Akademis, menambah suatu bukti empiris dan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik.
4. Bagi peneliti selanjutnya, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Kinerja Pemerintah Daerah

a. Pengertian Kinerja

Menurut Chabib (2011:3) Pengertian Kinerja adalah:

Gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.

Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai kinerja menurut beberapa ahli.

Pengertian kinerja Pemerintah Daerah menurut menurut Mohamad (2006:25) yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Menurut pendapat Soedarmayanti dalam Almanda (2013), mengatakan bahwa kinerja meliputi beberapa aspek, yaitu:

1. *Quality of work*, kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya.

2. *Promptness*, ketangkasan atau kegesitan pegawai dalam menyelesaikan tugas yang diberikan.
3. *Initiative*, semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggungjawabnya.
4. *Capability*, kemampuan individu untuk mengerjakan sebagian tugas dalam suatu pekerjaan baik kemampuan intelektual maupun kemampuan fisik.
5. *Communication*, komunikasi merupakan bagian penting untuk membangun relasi dan menumbuhkan motivasi antar pegawai sehingga terbina suatu kerjasama yang harmonis”.

Kinerja bagian dari produktivitas kerja, produktivitas berasal dari kata produktif yang artinya sesuatu yang mengandung potensi untuk digali, sehingga produktivitas dapatlah dikatakan sesuatu proses kegiatan yang terstruktur guna menggali potensi yang ada dalam sebuah komoditi.

Menurut beberapa pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kinerja mempunyai hubungan erat dengan masalah produktivitas dan efektivitas kinerja, karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas dan efektivitas kinerja yang tinggi dalam suatu instansi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya untuk mengadakan penilaian terhadap kinerja di suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting.

b. Arti penting kinerja pemerintah daerah

Kinerja pemerintah daerah memiliki arti yang sangat penting bukan saja bagi masyarakat selaku pemilik kedaulatan, dan para donator selaku penyumbang dana, tetapi juga penting bagi Pemerintah Daerah sendiri selaku Eksekutif,

terlebih-lebih bagi DPRD yang secara fungsional memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Menurut Chabib (2011:5) Arti penting kinerja pemerintah daerah di bagi menjadi enam bagian yaitu:

1. Sebagai umpan balik bagi Kepala Daerah untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang;
2. Untuk mencari kembali SKPD mana yang memberikan kontribusi terbesar dan SKPD mana yang kurang dalam memberikan kontribusi terhadap proses pencapaian visi Kepala Daerah serta mengidentifikasi berbagai faktor penyebab keberhasilan dan kekurangberhasilan dari setiap SKPD;
3. Untuk membangkitkan motivasi kerja Kepala SKPD dan jajarannya agar bekerja lebih produktif;
4. Untuk merumuskan kembali kebijakan, program dan kegiatan yang dinilai lebih efektif berikut penganggarannya serta metode/teknik pelaksanaan yang lebih efisien dalam proses pencapaian visi;
5. Melalui laporan kinerja, pemerintah daerah meninformasikan tingkat keberhasilan/kegagalannya secara jujur serta menjelaskan berbagai faktor kegagalannya baik kepada masyarakat, kepada para pemberi donasi, kepada DPRD dan kepada pemerintah tingkat di atasnya;
6. Meningkatkan derajat kepercayaan kepada masyarakat, bahwa dana publik yang dipercayakan kepadanya, telah dipergunakan sesuai amanat yang diberikan.

Menurut Abdul (2007) kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum dapat dikatakan juga bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu.

Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam dalam periode tertentu.

c. Tingkatan Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Chabib (2011:7) dilihat dari obyek Tingkatan Kinerja Pemerintah Daerah, dapat dibagi menjadi:

1). Kinerja Kebijakan

Kinerja Kebijakan ini menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan DPRD, karena kedua institusi inilah pihak yang menentukan dan mengambil kebijakan daerah. Umumnya Kepala Daerah mengajukan Rancangan Kebijakan (Peraturan Daerah) dan DPRD yang membahas dan menyetujuinya, atau sebaliknya Rancangan Peraturan Daerah lahir atas inisiatif DPRD dan Kepala Daerah yang membahas dan menyetujuinya.

2). Kinerja Program

Apabila Kinerja Kebijakan menjadi tanggungjawab Kepala Daerah dan DPRD, maka Kinerja Program menjadi tanggungjawab dari para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagaimana diketahui bahwa program pada dasarnya merupakan instrument dari kebijakan, dan oleh karenanya program yang disusun untuk melaksanakan suatu kebijakan, haruslah program yang sudah diperhitungkan secara matang, sehingga dengan dilaksanakan program tersebut tujuan/sasaran kebijakan akan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

3). Kinerja Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program, dengan demikian satu program dapat terdiri atas satu atau lebih kegiatan. Apabila Kepala Daerah dan DPRD bertanggungjawab atas benar/salahnya suatu kebijakan dan Kepala SKPD bertanggungjawab atas tepat atau tidaknya program dan implementasinya, maka para kepala subBagian, Kepala Bidang dan atau para Kepala Urusan bertanggungjawab atas terlaksana tidaknya suatu kegiatan.

d. Jenis Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Mohamad (2006:77), Indikator kinerja Pemerintah Daerah terdapat beberapa jenis yaitu:

1. Indikator masukan (*Input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

Misalnya:

- a. Jumlah dana yang dibutuhkan.
- b. Jumlah pegawai yang dibutuhkan.

2. Indikator proses (*Process*). Dalam indikator ini, organisasi/instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi/instansi, misalnya ketaatan pada peraturan perundangan.
3. Indikator keluaran (*Output*), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non-fisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Misalnya:
 - a. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan.
 - b. Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.
4. Indikator hasil (*Outcomes*), segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator ini, organisasi/instansi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Misalnya:
 - a. Tingkat kualitas produk atau jasa yang dihasilkan.
 - b. Produktivitas para karyawan atau pegawai.

5. Indikator manfaat (*Benefit*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil, misalnya tingkat kepuasan masyarakat.
6. Indikator dampak (*Impact*), pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya:
 - a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat.

e. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja adalah proses untuk mengukur prestasi kerja pegawai berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan sasaran (hasil kerjanya) dengan persyaratan deskripsi pekerjaan yaitu standar pekerjaan yang telah ditetapkan selama periode tertentu.

Menurut Umar (2003:87), pengertian penilaian kinerja adalah:

“Penilaian kinerja menilai hasil kerja nyata dengan standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan”.

Penilaian kinerja dapat terpenuhi apabila penilaian mempunyai hubungan dengan pekerjaan dan adanya standar pelaksanaan kerja agar penilaian dapat dilaksanakan secara efektif, maka standar penilaian hendaknya berhubungan dengan hasil-hasil yang diinginkan setiap pekerjaan.

Sedangkan Veithzal (2005:129) menyatakan bahwa sistem kinerja yang baik sangat bergantung pada persiapan yang benar-benar baik dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Praktis. Keterkaitan langsung dan pekerjaan seseorang adalah bahwa penilaian ditujukan pada perilaku dan sikap yang menentukan keberhasilan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.
2. Kejelasan standar. Standar merupakan tolak ukur seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Agar memperoleh nilai tinggi, standar itu harus pula mempunyai kompetitif.
3. Kriteria yang objektif. Suatu penilaian kinerja dapat dikatakan efektif apabila instrument penilaian kinerja tersebut memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. *Reliability*. Ukuran kinerja harus konsisten. Jika ada dua penilaian mengevaluasi pekerja yang sama, mereka perlu menyimpulkan hasil serupa menyangkut hasil mutu kerja.
 - b. *Relevansi*. Ukuran kerja harus dihubungkan dengan *output* riil dari suatu kegiatan yang secara logika itu mungkin.
 - c. *Sensitivity*. Beberapa ukuran mampu mencerminkan antara penampilan nilai tinggi dan rendah. Penampilan tersebut harus dapat membedakan dengan teliti tentang perbedaan kinerja.
 - d. *Practicality*. Criteria harus dapat diukur dari kekurangan data dan tidak terlalu mengganggu atau tidak in-efisien”.

Penilaian kinerja secara regular yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan kinerja setiap pegawai. Tindakan ini akan membuat pegawai untuk senantiasa berorientasi terhadap tujuan dan berperilaku kerja sesuai dan searah

dengan tujuan yang ingin dicapai. Penilaian kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan informasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi serta mengetahui dampak yang ada.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian penilaian kinerja, dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu sistem penilaian secara berkala terhadap kinerja pegawai yang mendukung kesuksesan organisasi atau yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Proses penilaian dilakukan dengan membandingkan kinerja pegawai terhadap standar yang telah ditetapkan dan karena organisasi pada dasarnya dijelaskan oleh manusia, maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam organisasi.

f. Manfaat Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Ihyaul (2004:277) mengemukakan bahwa manfaat dalam kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen;
- 2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- 3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja;
- 4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara obyektif atas pencapaian prestasi

yang diukur sesuai dengan system pengukuran kinerja yang telah disepakati;

- 5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi;
- 6) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi;
- 7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah;
- 8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Abdul (2007:137) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, sedangkan pengurusan khusus berkaitan dengan barang inventaris daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005, pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah:

“Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”

Pengertian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengelolaan keuangan Daerah

Yang harus diperhatikan dalam perencanaan adalah:

- a. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai.
- b. Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah dibawah koordinasi sekretaris daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban

berupa a). Laporan Realisasi Anggaran b). Neraca c). Laporan Arus Kas dan d). Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

4. Pengawasan

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

b. Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Chabib (2010:10), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah

dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat.

2. *Value for Money*

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*, seperti masalah ketidakhematan, temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

3. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.

4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan- kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan

masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

5. Pengendalian

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan.

c. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun asas umum pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

d. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa tujuan pokok dari penyusunan keuangan daerah:

- a. Memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah.
- b. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab, dan pasti.
- c. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang mencerminkan pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mendukung otonomi daerah penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya, dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah yang bersangkutan.
- d. Menciptakan acuan dalam alokasi penerimaan negara dari daerah.
- e. Menjadikan pedoman pokok tentang keuangan daerah.

e. Sumber-Sumber Keuangan Daerah

Sumber-sumber keuangan daerah menurut UU No.33 Tahun 2004 Pasal 157, meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah
 1. Hasil Pajak Daerah.
 2. Hasil Retribusi Daerah.
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
 4. Lain-Lain PAD Yang Sah.
- b. Dana Perimbangan
 1. Dana Bagi Hasil.

2. Dana Alokasi Umum.
 3. Dana Alokasi Khusus.
- c. Pinjaman Daerah
1. Pemerintah.
 2. Pemerintahan Daerah.
 3. Lembaga Keuangan Bank.
 4. Lembaga Bukan Keuangan Bank.
 5. Masyarakat.
- d. Lain-Lain Penerimaan Daerah
1. Hibah
 2. Dana Darurat

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa sumber-sumber keuangan daerah berasal dari pendapatan hasil daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan daerah lainnya.

3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

a. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Abdul (2007: 42) Defenisi dari Akuntansi Keuangan daerah adalah:

Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi).

Sedangkan didalam Kepmendagri No. 21 Tahun 2011, mengemukakan:

Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Pasal 23:ayat 1).

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

b. Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, meliputi:

1. Pencatatan, bagian keuangan melakukan pencatatan selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
2. Penggolongan dan pengikhtisaran, Adanya penjurnalan dan melakukan *posting* ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan.
3. Pelaporan, setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, necara, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai

posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut oleh bagian keuangan akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Pihak-pihak yang memerlukannya antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Badan Pengawasan Keuangan; Investor; Kreditor; dan donatur; Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah; Rakyat; Pemerintah Daerah lain; dan Pemerintah Pusat yang semuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

c. Kedudukan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah didalam Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu disiplin ilmu sehingga akuntansi memiliki lingkup yang luas. Oleh karena itu, akuntansi dibagi menjadi beberapa bidang berdasarkan pokok bahasan yang dikaji. Apabila pokok bahasan yang dikaji adalah entitas penyusunan laporan keuangan, maka akuntansi terbagi menjadi akuntansi sektor privat dan akuntansi sektor publik atau terbagi menjadi akuntansi komersial, akuntansi pemerintahan (sektor publik) dan sosial. Dilain pihak apabila pokok bahasan yang dikaji adalah pengguna informasi akuntansi, maka akuntansi terbagi menjadi akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Dalam sistematika ilmu akuntansi, dalam klasifikasi pertama kedudukan akuntansi keuangan daerah adalah dalam akuntansi sektor publik atau dalam akuntansi pemerintahan. Sedangkan dalam klasifikasi kedua, akuntansi keuangan daerah tergolong dalam akuntansi keuangan.

Dalam akuntansi pemerintahan (sektor publik) data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan

pemerintah (sektor publik) kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat (publik).

Abdul (2004: 28) menyatakan lingkup akuntansi pemerintahan (sektor publik) adalah:

1. Akuntansi Pemerintah Pusat
2. Akuntansi Pemerintah Daerah, terdiri atas:
 - a. Akuntansi Pemerintah Propinsi
 - b. Akuntansi Pemerintah kabupaten/kota

d. Lingkungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang andal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang.

Menurut Abdul (2002:30) menyebutkan bahwa pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang berkepentingan terhadap pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung tersebut disebut *Stakeholders* yang meliputi:

- a. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
- b. BPK (Badan Pengawas Keuangan)
- c. Investor, Kreditor, dan Donatur
- d. Analisis ekonomi dan pemerhati Pemerintah Daerah
- e. Rakyat

f. Pemerintah Pusat

g. Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kota, dan Propinsi)

Adapun pihak-pihak eksternal Pemerintah Daerah yang berkepentingan terhadap Pemerintah Daerah, diuraikan sebagai berikut:

a. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Adalah badan yang memberikan otorisasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan daerah.

b. BPK (Badan Pengawas Keuangan)

Adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang termasuk dalam badan ini adalah: Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

c. Investor, Kreditor, dan Donatur

Badan atau organisasi baik pemerintahan, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi Pemerintah Daerah.

d. Analisis ekonomi dan pemerhati Pemerintah Daerah

Yaitu pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan Pemerintah Daerah, seperti: Lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi termasuk akademisnya), ilmuan, peneliti, konsultan, LSM, dan lain-lain.

e. Rakyat

Rakyat disini adalah kelompok masyarakat yang perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan Pemerintah Daerah atau yang menerima produk atau jasa dari Pemerintah Daerah.

f. Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat memerlukan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk menilai pertanggungjawaban Gubernur sebagai wakil pemerintah (Pasal 2 PP No. 108/2000).

g. Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kota, dan Propinsi)

e. Kebijakan Pengembangan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk memproses transaksi keuangan pemerintah sampai dilaksanakannya laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa sistem akuntansi meliputi berbagai elemen yang diperlukan dalam proses akuntansi. Elemen-elemen tersebut antara lain: formulir, catatan, buku-buku, laporan, sumber daya manusia, kebijakan, prosedur dan prasarana lain yang diperlukan. Seluruh elemen ini saling berinteraksi dalam menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Berhubung sistem akuntansi mencakup berbagai elemen sebagaimana disebutkan di atas, maka pengembangan sistem harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kesiapan berbagai elemen tersebut.

Pengembangan sistem akuntansi ini harus berpedoman pada pokok-pokok pengembangan sistem akuntansi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Untuk keperluan dimaksud, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Kepmendagri No. 29 tahun 2002. Kepmendagri tersebut hanya mengatur hal-hal pokok saja. Dengan demikian Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang diperoleh PP No. 105 tahun 2000 wajib mengembangkan sistem akuntansi yang mampu menghasilkan laporan sesuai dengan mengajukan pada pedoman tersebut akan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Di dalam Kepmendagri no. 29 tahun 2002 tersebut juga dinyatakan bahwa sistem akuntansi disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah. Oleh karena itu apabila terdapat ketidaksesuaian antara lain butir-butir yang diatur dalam Kepmendagri dan standar akuntansi, Pemerintah Daerah seharusnya mengacu kepada Standar Akuntansi keuangan Pemerintah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini antara lain:

Irvan (2013) dalam penelitiannya tentang pengaruh partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Subang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian Abdul (2009) tentang pengaruh implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan dan kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi

pemerintahan dan implementasi keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan intern.

Hasil penelitian Wawan dan Lia (2009), menguji pengaruh pengawasan intern dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan pengawasan intern dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai hubungan yang sangat kuat. Artinya pengawasan intern yang dilaksanakan efektif dan kontinyu mempengaruhi pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan akan lebih baik dan sebaliknya pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah yang telah diterapkan dengan baik pada prinsipnya mempengaruhi pengawasan intern, karena pengawasan intern yang dilaksanakan.

Selanjutnya penelitian Almanda, yang meneliti pengaruh pengawasan intern, dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh secara simultan dari pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

C. Kerangka Konseptual

Keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diukur semata-mata dari perspektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya. Pengukuran dan penilaian kinerja pemerintah merupakan hal yang sangat vital karena peningkatan kualitas informasi keuangan pemerintah menjadi tugas yang

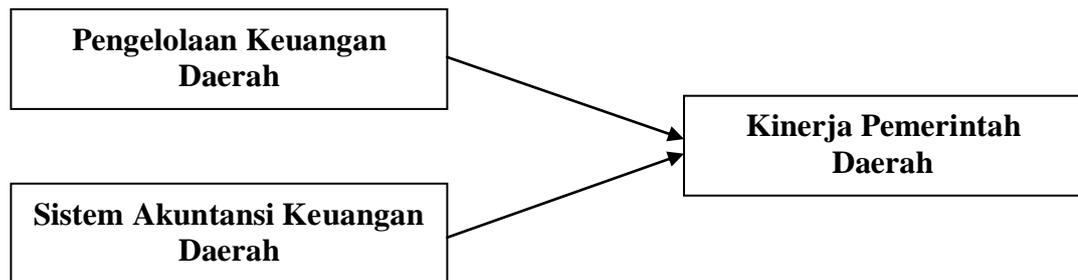
penting. Tujuan utama evaluasi kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam mematuhi standar-standar perilaku yang ditetapkan sebelumnya, guna menghasilkan tindakan dan *outcome* yang diinginkan.

Pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan baik jika pemerintah daerah dapat mendefinisikan secara jelas tujuan dari pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menandakan bahwa bila pemerintah daerah secara jelas dapat mendefinisikan atau merumuskan tujuan pengelolaan keuangan daerah, maka kebijakan tentang alokasi sumber daya daerah untuk kepentingan publik dapat tercapai. Manfaat utama dilakukannya pengelolaan keuangan daerah adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Jika pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta kinerja pemerintah daerah yang baik juga.

Selain dilakukannya pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang baik perlu peningkatan sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai. Tidak adanya sistem akuntansi keuangan yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas informasi yang disajikan. Dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai diharapkan mampu menjamin bahwa segala peristiwa penting kegiatan pemerintah terekam dengan baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan laporan keuangan, dimana bisa diperiksa segala transaksi yang terjadi. Dengan adanya sistem

akuntansi keuangan daerah yang memadai, maka akan menciptakan kinerja yang baik pada suatu instansi.

Dari uraian diatas maka dapat dibuat kerangka konseptual dalam penelitian ini, yang dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1: Kerangka Konseptual Penelitian

D. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan, latar belakang, penelitian terdahulu dan kajian teori di atas, maka rumusan hipotesis penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

H1 : Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

H2 : Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada instansi pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada instansi pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman.

B. KETERBATASAN

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pemilihan responden dalam melakukan pilot test. Responden pilot test dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi akuntansi FE UNP yang memiliki konsentrasi Akuntansi Sektor Publik, sebaiknya yang menjadi responden dalam pilot test adalah pegawai instansi pemerintahan selain instansi tempat peneliti melakukan penelitian.

C. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak:

1. Instansi agar selalu taat pada peraturan atau prosedur dalam melakukan kegiatan, serta mengusahakan ketepatan waktu dalam menghasilkan barang atau jasa.
2. Instansi agar lebih sering melakukan evaluasi kinerja yang terkait dengan pengelolaan keuangan.
3. Diharapkan kepada instansi untuk lebih teliti dalam pembuatan jurnal, karena jurnal merupakan salah satu bagian terpenting dalam siklus akuntansi. Selain itu juga diharapkan agar dapat mengoptimalkan penggunaan kode rekening untuk memudahkan pengklasifikasian dan juga pada saat pencatatan. Selain itu penggunaan kode rekening juga memudahkan pemakai laporan keuangan untuk menganalisa laporan keuangan dalam mengambil keputusan.